

## “70% Anggaran penanggulangan AIDS dari asing”

**Jakarta—**

Hampir sekitar 70% total anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia berasal dari pendanaan asing. Hal tersebut berpotensi membuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia menjadi tergantung dengan asing.

“Ketergantungan teman-teman dengan dana asing sangat luar biasa,” jelas perwakilan UN General Assembly Special Session (UNGASS) AIDS, Hartoyo, saat menyampaikan sejumlah persoalan terkait upaya pemberantasan HIV/AIDS dalam audiensi dengan Panitia Kerja (Panja) Millennium Development Goals (MDGs) DPR RI, Senin (25/10).

Audiensi tersebut digelar Panja MDGs untuk mencari masukan dari berbagai kalangan dan organisasi yang selama ini menaruh perhatian dalam isu-isu HIV/AIDS, mengingat pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya masuk dalam poin ke-6 MDGs. Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan dari organisasi yang bersangkutan dengan HIV/AIDS, seperti UN General Assembly Special Session (UNGASS) AIDS; Jaringan Orang Terinfeksi HIV/AIDS Indonesia (JOTHI); KPA, dan juga jajaran anggota Panja MDGs DPR RI yang terdiri dari Ketua Panja MDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf; anggota Panja MDGs Roy Suryo dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Ketua Panja MDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf mengaku prihatin dengan pencapaian MDGs poin empat (mengurangi tingkat kematian anak di bawah lima tahun), lima (meningkatkan kesehatan ibu) dan enam (memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya) yang dilakukan di Indonesia. Sejauh ini, ketiga poin MDGs tersebut perlu perjuangan lebih oleh Indonesia dalam memenuhi target pencapaiannya pada 2015. “Hari ini, kami khusus membahas tujuan nomor enam dari MDGs. Kami ingin sekali bisa mengetahui di mana kelemahan dan apa kendalanya, termasuk dari sisi penganggarnya,” urainya.

Hal tersebut tak disia-siakan oleh pihak-pihak yang hadir. Sejumlah kalangan mengeluhkan sejumlah hambatan yang terjadi dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia. UNGASS bahkan mencatat banyaknya peraturan daerah (Perda) yang tidak ramah dalam perang melawan HIV/AIDS. “Komnas Perempuan mencatat sekitar 158 Perda (tidak ramah), dan ada 37 Perda mengkriminalkan prostitusi. Sampai sekarang, Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan upaya signifikan untuk bisa menghentikan Perda itu,” beber Hartoyo yang juga memaparkan penanggulangan HIV/AIDS di Thailand masih lebih baik dari Indonesia.

Berdasarkan tabel tentang kasus AIDS hingga Juni 2010, KPA mencatat terjadi penurunan jumlah kasus dari 3.863 kasus pada Desember 2009 menjadi 1.797 kasus pada Juni 2010. Namun, jumlah kumulatif kasus masih tinggi yang mencapai 21.770 kasus. Bila dikaitkan dengan pencapaian MDGs poin enam, KPA mencatat, Indonesia masih perlu meningkatkan persentase kesadaran masyarakat yang menggunakan kondom pada hubungan seks berisiko, hingga akses ke ODHA yang mendapatkan pengobatan Antiretroviral (ARV). **(BKSAP DPR RI)**